

ABSTRAK

Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, untuk itu bagi masyarakat yang sudah mempunyai tanah diharapkan untuk melakukan pendaftaran tanah agar mendapat sertifikat yang merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah. Namun dalam praktek sekarang ini berkenaan dengan sertifikat tanah tidak jarang terbit 2 (dua) sertifikat atau sering disebut sertifikat ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya sertifikat ganda serta bagaimana peranan badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sertifikat ganda di BPN Kota Semarang.

Permasalahan diatas dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang meliputi pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis. Dalam pendekatan hukum normatif penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada dalam skripsi ini. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan hukum sosiologis dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada pegawai BPN. Untuk metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum, sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya sertifikat ganda di BPN kota Semarang, faktor yang pertama adalah kesalahan dari pemilik tanah yang tidak memperhatikan tanah miliknya sendiri dengan baik dan tidak bisa memanfaatkan tanahnya sehingga bisa diambil alih orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik sah, faktor yang kedua dari kantor BPN karena pejabat kurang teliti terhadap perkara yang ada, dan faktor terakhir dari pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak punya data yang sudah bersertifikat atau data tidak valid. Untuk peran BPN dapat disimpulkan bahwa peranan BPN dalam penyelesaian sertifikat ganda adalah untuk menelaah dan mengelola data yang digunakan untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan dan menampung gugatan atas perkara yang yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang telah merugikan negara.

Kata Kunci : Tanah, Sertifikat Ganda, Peranan BPN

ABSTRACT

Land is a basic need for humans, so that people who already have land are expected to register land to get a certificate from the government. But in current practice with regard to land certificate it is not uncommon to issue 2 (two) certificate or often called double certificate. This study aimsto find out what are the factor of the occurrence of multiple certificate and the role of the national land agency in the completion of the double certificate at the City BPN Semarang.

The above problems were examined using empirical juridicial researchmethods which included normative legal approaches and sociological legal approaches. In the approach to normative law the author conducts research on library materials in this thesis. This approach is carried out to obtain primary data by conducting research and direct interview with BPN employee. For the thinking method used is the deductive thinking method, namely the way of thinking in drawing conclusions drawn from something that is general, it has been proven that he is right and the conclusion is intended for something that is special.

Based on the results of the study it can be concluded that the factors of the occurrence of double certificates in the city BPN Semarang, the first factor was the fault of the landowner who did not pay attention to his own land properly and could not use his land so that he could be taken over by someone else without the knowledge of the owner, the second factor is from the BPN office because officials are less careful about the cases, and the last factor is from the local government, urban village or village that do not have certificate data or invalid data. For the role of BPN, it can be concluded that the role of BPN in the settlement of multiple certificate is to examine and manage data used to resolve cases in the land sector and accommodate claims for cases filed through the judiciary against individuals and legal entities that have harmed.

Keywords : Land, Double Certificate, The Role of BPN